

REKONSILIASI DAN KEBENARAN

“Refleksi sebagai jalan menuju rekonsiliasi politik dan kebijakan pemerintah kasus 1965 dalam terang pemikiran Jurgen Habermas”

Abstraksi :

Dalam setiap isu dan kasus dalam tubuh pemerintahan, media masa dengan cepat menanggapinya. Demikian halnya dengan mata dan telinga (red. Politik) masyarakat. Pemerintah ibarat tubuh, sedangkan masyarakat adalah bagian-bagiannya. Tidaklah heran bila isu kasus PKI dan Kasus pembantaian 1965 sangat diinginkan satu *rekonsiliasi* bagi para *keluarga* korban. Bukan saja untuk mendapatkan pengampunan, akan tetapi lebih dari itu semua mata dan telinga hendak mendambakan kebenaran historis kasusu-kasus tersebut.

Kasus besar ini mesti dihadirkan suatu kebenaran narasi historis sebagaimana adanya. Agar seluruh mata dan telinga yang mengetahui tidak mendapatkan *pelecehan* terhadap memori ingatan. Penulis hendak menghadirkan fakta-fakta dalam kasus 1965 sebagaimana adanya, dengan berlandaskan pada pengumpulan data dari beberapa tulisan yang mencoba untuk menghadirkan kasus ini dalam terang kebenaran.

Waktu yang sama juga, penulis mencoba melihat beberapa kebijakan pemerintah dalam menangani dan memberi terang *kebenaran* dan atau *kebenaraan yang dibelokan* terkait kasus tragedi 1965. Dan di masa kini, penulis juga mencoba melihat kehadiran pemerintah dalam menanggapi kasus-kasus yang terjadi, sekaligus menilik kebijakan-kebijakan pemerintah.

Kata Kunci: Tragedi 1965, Kebijakan Pemerintah

I. Narasi Historis Tragedi 1965

Kejahatan terbesar manusia itu pertama-tama terjadi ketika manusia tidak sanggup untuk berpikir lagi, suatu ide gila Hannah Arendt dalam mengkaji dan menganalisis soal banalitas kejahatan.¹ Berpikir menurut pemahaman Arendt ialah berpikir tentang dunia. Dengan demikian berpikir selalu melibatkan orang lain dan dunia sekitar. Sehingga ketidakmampuan manusia untuk berpikir menyebabkan ia mengisolasi dirinya dari dunia sekitar serta mengeklusifkan sesama yang selanjutnya memandang tindakan kejahatan sebagai sesuatu yang banal.

Tahun 1965 adalah tahun penuh kenangan dan merupakan tahun kekelaman dimana tragedi kemanusiaan terjadi di bumi pertiwi. Para pelaku kejahatan adalah pribadi yang tidak sanggup untuk “berpikir” lagi, jika ditinjau dari analisis Arendt. Pertanyaan yang menggelitik adalah mengapa para pelaku kejahatan bisa begitu bodoh sehingga dengan kepala dingin membunuh saudara-saudara setanah air. Dan yang lebih miris ialah semuanya dilakukan atas kepentingan (ada pemerintah di sana) bukan atas kebaikan bersama. Di samping itu para pelaku juga mendapat dukungan dari para **tokoh agama dan pemerintah Indonesia**, sesuatu pemandangan ironis.²

Diskursus mengenai upaya rekonsiliasi terhadap korban pembantaian massal ratusan ribu manusia yang dicap komunis pada kurun waktu 1965/66 kembali menguat saat pemerintahan Jokowi-JK yang bertekad untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Akan tetapi hingga detik ini segala daya dan upaya seakan belum mendapat angin segar untuk dikatakan sebagai upaya rekonsiliasi yang berhasil.

II. Historisitas kasus 1965³

¹Hanna Arendt, *The Human Condition* (Chicago: The University of Chicago Press, 1958), hlm. 237.

²Anonim. “Menjaring Angin: Kronik Percaturan Politik di Maumere, NTT, Jelang, Selama Dan Pasca Pembantaian 20 Februari – 29 April 1966.” Ende 1974. Manuskrip ini, beredar di Maumere dalam bentuk fotokopi.

³Secara garis besar, data dalam tulisan ini di ambil dari beberapa bunga rampai yang dipadukan menjadi satu jalinan tulisan berkaitan dengan beberapa kronologi dalam waktu yang sekiranya bisa membantu memberi gambaran umum bagaimana kasus 1965 terjadi.

Sejarah selalu ditulis oleh para pemenang, sehingga acapkali menimbulkan kerancuan. Sejarah selalu bergerak pada tataran kepentingan, mengabaikan aspek-aspek yang lebih mulia yakni demi kebaikan bersama. Akhirnya sejarah adalah sekumpulan kisah yang terekam dalam memori ingatan, entah di dalam penuturan secara lisan, dalam bentuk tulisan, juga dalam bentuk museum. Berkenaan dengan upaya rekonsiliasi *memoria passionis*⁴, kasus kejahatan pembunuhan massal tahun 1965/66 terhadap para anggota PKI dan antek-anteknya, tentunya aspek historisitas perlu untuk ditelaah lebih jauh. Maka, pada bagian ini penulis mencoba untuk menghadirkan kilasan historis pembantaian massal 1965/66.

Pembantaian massal terhadap para petinggi dan simpatisan PKI atau orang-orang yang dicap sebagai komunis, menurut beberapa penelitian yang pernah penulis dalam ternyata semuanya bermula dari konflik internal dalam tubuh Angkatan Darat. Konflik itu kemudian mendapatkan jalan manifestasinya setelah timbul isu-isu Dewan Jenderal (Letjen A. Yani dan jajarannya) yang berencana melakukan kudeta terhadap kekuasaan Soekarno. Isu ini kemudian ditanggapi oleh para perwira Angkatan Darat yang mendukung penuh kebijakan sosialisme Soekarno dengan melakukan aksi polisionil di mana para petinggi itu (tujuh jenderal) yang diduga mengetahui tentang Dewan Jenderal dihadapkan ke presiden Soekarno. Operasi tersebut dipimpin oleh Kolonel Untung, seorang perwira Angkatan Darat, yang menamakan diri sebagai pemimpin Dewan Revolusi.

Operasi ini akhirnya mengalami kegagalan setelah perencanaan awal untuk menghadapkan hidup-hidup ketujuh jenderal tidak sesuai prosedur awal. Di mana tiga dari tujuh jenderal yang dijemput paksa tersebut sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi dan Jenderal A.H. Nasution lolos dari penangkapan. Hal ini dikarenakan karena adanya miskomunikasi antara para pimpinan, kolonel untung dan D.N. Aidit selaku ketua PKI. Kegagalan ini kemudian berlanjut di Lubang Buaya dengan membunuh para jenderal yang masih hidup hal ini dilakukan karena komplotan itu kehilangan akal sehatnya. Ingat kejahatan manusia pertama-tama karena manusia tidak sanggup untuk berpikir lagi. Akhirnya kegagalan ini pun susul-menyusul. Para pimpinan PKI akhirnya membelokkan rencana awal dan berusaha untuk merebut kekuasaan dari tampuk kekuasaan yang sah yaitu Soekarno. Akan tetapi di sisi lain Soeharto yang waktu itu menjabat sebagai panglima Kostrad mulai bergerak dengan mengadakan operasi untuk menumbangkan gerakan Dewan Revolusi, dan langsung mengambil kesimpulan bahwa semuanya adalah karena PKI. Sehingga ia berani

⁴Felix Baghi, "Manuskrip Mata Kuliah Filsafat Pengakuan." Maumere: STFK Ledalero, 2021.

merekayasa kisah sejarah dan mencap orang-orang komunis sebagai pengkhianat dan musuh negara.

Kisah pun berlanjut dengan adanya penangkapan dan pembantaian massal terhadap para anggota PKI beserta simpatisannya. Pembantaian dimulai sejak Januari 1966 dan berpuncak pada paruh kedua di tahun 1966 dan akhirnya mereda pada awal tahun 1967. Para laskar dan ribuan masyarakat sipil yang menamakan diri mereka sebagai penegak hukum serta tentara Angkatan Darat mulai melancarkan aksi beringas mereka. Menangkap dan menjebloskan ke penjara ribuan anggota PKI dan simpatisannya tanpa proses peradilan yang jelas hingga berakhir di lubang pembantaian massal. Tercatat pembantaian massal itu terjadi hampir di seluruh Indonesia namun yang lebih parah ialah di daerah-daerah yang menjadi basis PKI. Hingga detik ini perihal jumlah korban belum diketahui secara pasti. Akan tetapi angka ribuan adalah angka diplomatis yang layak untuk dipertimbangkan kevalidannya. Konspirasi perihal jumlah korban dan pelaku serta dalang peristiwa tersebut hingga kini menjadi semacam menu yang layak dipasaran.

III. Rekonsiliasi Politik : Kritik Habermas

Usaha dan kebijakan pemerintah dalam menanggapi kasus ini, ada beberapa pertanyaan dan sekaligus pemikiran Habermas yang juga berbicara soal usaha dan upaya pemerintah untuk mencapai rekonsiliasi dan kebenaran.

3.1. Apa yang mesti dibuat?

Kata rekonsiliasi ini berasal dari kata bahasa Latin, *reconciliatio* bentuk kata benda dari kata kerja *reconciliare* yang artinya mendamaikan, mengumpulkan kembali. Secara leksikal kata rekonsiliasi berarti tindakan memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula serta tindakan untuk menyelesaikan perbedaan. Dengan merujuk pada kedua jalan pengertian ini maka secara sederhana kata rekonsiliasi politik adalah upaya pemulihan atau pendamaian kembali suatu keadaan *chaos* atau peristiwa kelam serta *memoria passionis* oleh karena suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi di masa silam, di mana kedua belah pihak (korban dan pelaku) berkumpul bersama, mengkomunikasikan kebenaran masing-

masing dalam suatu diskursus secara publik dan rasional agar dapat tercapainya konsekuensi akan *bonnum commune*.⁵

Impian akan Indonesia yang satu tak mungkin terwujud tanpa menggubris hak-hak para korban sejarah masa lalu yang berjatuh akibat kejahatan massif yang dilakukan oleh negara. Dalam konteks ini, nasionalisme Indonesia tidak hanya sebatas perlawanan terhadap imperialisme. Nasionalisme juga harus mampu mengungkapkan solidaritas terhadap mereka yang hak-haknya terabaikan oleh praktik-praktik politik totaliter negara seperti rezim Orde Baru.⁶ Rekonsiliasi dengan para korban sejarah ini adalah prasyarat pembangunan prinsip persatuan Indonesia. Dalam kasus luka masa lalu, pemerintah harus juga bersolider dengan para korban sebagai bentuk permohonan maaf dan pengakuan akan kesalahan yang dibuat oleh pemerintah. Pemerintah harus dapat membangun kembali relasi dengan para korban.

Habermas menganjurkan agar menghadapi kecacatan dalam pengolahan dan penyebaran berita dalam bahasa mestinya difilter dengan pikiran rasional yang dapat diterima⁷. Artinya kebenaran dalam narasi perlu dinomori satukan. Ia menerapkan konsep rasionalitas secara sosial. Rasionalitas instrumen harus menjadi jembatan yang memberi efek terang bagi narasi dan memori masa silam yang dibelokan media masa karena kepentingan politik pihak tertentu.

Upaya rekonsiliasi terhadap korban dan keluarga korban peristiwa G30S telah dimulai oleh Gus Dur selaku presiden Republik Indonesia kala itu. Ini merupakan suatu kebijakan pemerintah yang mestinya dikawal dalam bingkai kebenaran dan keadilan. Setelah reformasi berhembus angin segar akan rekonsiliasi. Segala daya upaya telah dikerahkan. Mulai dari permohonan maaf sampai pada upaya ganti rugi. Habermas memberi alternatif untuk melalui jalan komunikasi, komunikasi dengan keluarga korban. Pemerintah sudah berusaha sedemikian rupa, hanya saja kepentingan politik pihak tertentu masih mempengaruhi usaha pemerintah tersebut. Namun, semuanya mengalami kegagalan atau belum adanya hasil maksimal dari rekonsiliasi tersebut.

3.2. Mengapa Pemerintah gagal?

⁵Mengutip Otto Gusti Madung dalam tulisannya yang berjudul, "Rekonsiliasi, Politik Amnesti Dan Prinsip Persatuan." dari buku Johan Baptist Metz, *Memoria Passionis. Ein provozierendes Gedächtnis in pluralistischer Gesellschaft*, (Freiburg im Breisgau: Herder Verlag, 2006), hlm. 173.

⁶Otto Gusti Mdung. "Rekonsiliasi, Politik Amnesti dan Prinsip Persatuan." (2015): 1-10.

⁷Barut, Martin C., Pius Kanelmut, and Krispianus W. Sarhe. "Merajut Kembali Relasionalitas Masyarakat dan Pemerintah: Relevansi Politik Berasaskan Rekonsiliasi dan Kebenaran." *FOCUS* 2.1 (2021): 38-45.

Berikut saya mencoba untuk menelaah dan mengemukakan beberapa hal yang membuat rekonsiliasi politik kasus 1965 menjadi gagal. Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal, di antaranya ialah: **pertama**, manusia adalah makhluk sosial (*homo socius*) sehingga membutuhkan interaksi yang sehat dan normal terhadap orang lain. Gagalnya upaya rekonsiliasi adalah karena manusia kehilangan interaksi yang harmonis terhadap sesamanya. Mereka yang dicap komunis atau simpatisannya harus menerima stigma buruk yang telah tertanam dalam diri masyarakat karena propaganda Orde Baru. Hal ini dilihat oleh Habermas sebagai faktor dominasi instrumental yang berakar pada uang dan kepentingan politik pihak tertentu. Sehingga dalam upaya rekonsiliasi tersebut, pemerintah masih mengalami kemacetan dalam berkomunikasi dengan masyarakat sosial dalam menyuarakan kebenaran.

Hal ini menjadi penghalang dalam terciptanya rekonsiliasi yang baik. **Kedua**, manusia juga adalah makhluk sejarah (*homo historia*) sehingga ingatan masa lalu atau kenangan akan sejarah masa silam terus menghantui para korban. Hal ini kemudian memicu *memoria passionis* kembali mencuat ke permukaan, sehingga ingatan tersebut menjadi benteng yang teguh yang pada akhirnya rekonsiliasi tidak dapat dijalankan dengan baik. Semuanya menutup diri. Kebenaran terus dibungkam dan yang ada ialah ketakutan untuk berkumpul membicarakan upaya rekonsiliasi. Selama sejarah dan ingatan akan masa lalu (*memoria passionis*) berjalan sendirian maka upaya rekonsiliasi akan terus mengalami kegagalan demi kegagalan.

Ketiga, upaya rekonsiliasi mengalami kegagalan karena pemerintah hanya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak korban atau keluarga korban sehingga upaya rekonsiliasi itu belum maksimal dijalankan. Apalagi upaya rekonsiliasi mendapat tantangan akan stigma yang telah tertanam kuat dalam diri masyarakat di masa pemerintahan Orde Baru. Di mana masyarakat memandang komunis sebagai yang jahat menilik propaganda pemerintah Orde Baru dan penulisan buku-buku sejarah yang lebih menyudutkan PKI dan simpatisannya. Hal ini semakin mempersulit proses rekonsiliasi karena permohonan maaf belum maksimal dijalankan oleh para pelaku.

Keempat, menilik Hannah Arendt dalam teori rekonsiliasi politiknya, di mana ia menawarkan dua upaya dalam proses rekonsiliasi politik yaitu permohonan maaf dan janji. Kedua upaya ini telah ditempuh di mana pemerintah telah menyampaikan permohonan maaf dan janji berupa ganti rugi. Namun hal ini masih menuai kegagalan. Mengapa demikian?" hemat saya ialah realitas menunjukkan bahwa upaya rekonsiliasi lebih banyak memberi

perlindungan kepada pelaku daripada mengedepankan keadilan bagi korban. Permohonan maaf nampaknya hanyalah formalitas belaka. Sebab nyatanya keadilan masih berjalan pincang, menengok realitas peradilan di negeri ini di mana hukum seakan tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah. *Kelima*, rekonsiliasi politik menjadi gagal karena upaya untuk membawa pelaku ke meja hijau hanyalah sebatas wacana yang seakan menjadi konsumsi murahan. Permohonan maaf tidak serta merta membuat para korban begitu saja melupakan sejarah atau *memoria passionis* melainkan keadilanlah yang membuat mereka merasa semartabat dengan sesamanya.

3.3. Apa yang dapat dibuat?

Rekonsiliasi adalah hak setiap manusia, maka rekonsiliasi perlu dilaksanakan agar terjamin nilai dari sila kelima Pancasila yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. *Memoria passionis* adalah luka. Luka itu dapat sembuh bukan karena dibiarkan begitu saja melainkan disembuhkan oleh karena pengobatan. Peristiwa pembantaian massal terhadap para anggota PKI dan simpatisannya menimbulkan luka, dan luka itu dapat sembuh apabila ada pengobatan dalam hal ini ialah proses rekonsiliasi. Yang ditekankan di sini bukan terletak pada hasil apa yang dicapai dari rekonsiliasi melainkan proses rekonsiliasi yang baik yaitu pelurusan sejarah dengan merevisi sejarah serta permohonan maaf setulus-tulusnya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi apa yang telah dibuat. Untuk itu rekonsiliasi politik apa yang saya tawarkan ialah **rekonsiliasi kebenaran**.⁸

Kedua term ini sangatlah berkaitan erat satu sama lain. Rekonsiliasi tidak bisa dijalankan tanpa pengungkapan kebenaran. Dan nilai kebenaran menjadi nyata atau memiliki maknanya yang mendalam apabila dilanjutkan dengan tindakan rekonsiliatif⁹. Pengungkapan kebenaran bukan menjadi ajang menaruh dendam, tetapi untuk menampilkan keluhuran harkat dan martabat manusia sebagaimana mestinya. Tindakan rekonsiliatif bukan sekadar duduk bersama dan membicarakan masa lalu dan berdamai. Tindakan rekonsiliatif yang benar ialah rekonsiliasi dengan menghadirkan dasar dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hal ini pertama-tama bukan untuk membenarkan diri atau rehabilitas melainkan untuk mengangkat harkat dan martabat yang manusiawi. Rekonsiliasi juga bukan terletak pada

⁸Otto Gusti Madung, *Negara, Agama Dan Hak Asasi Manusia* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2014), hlm. 65.

⁹Otto Gusti Madung, *Filsafat Politik: Negara dalam Bentangan Diskursus Filosofis*. Dalam artikel repository stfk, 2013.

tataran penyembuhan psikologis, melainkan pengejawantahan secara yuridis. Kebenaran adalah harga mati. Mencari dan membuka kebenaran ialah sinonim dengan membuka luka-luka lama. Luka lama itu telah membusuk jadi janganlah membiarkannya terus membusuk karena pada akhirnya jalan amputasi akan ditempuh disini hal ketimpangan menjadi semakin kuat sehingga negara berjalan pincang dalam hal kebenaran.

Luka lama yang membusuk itu segera dibuka, dibersihkan dan diobati dengan obat pelurusan sejarah agar tercapailah rekonsiliasi kebenaran. Hemat saya rekonsiliasi kebenaran ini mesti diprioritaskan. Merevisi ulang kisah sejarah serta diikuti dengan pengungkapan secara jujur dari pihak pelaku, dan dengan spiritualitas kerendahan hati mengakui kesalahan dan secara tulus ikhlas memohon maaf atas apa yang telah diperbuat di masa lalu dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi di masa depan sehingga dengan melihat kerendahan hati dan ketulusan dari para pelaku, pihak korban dapat menerima kebenaran dan permohonan maaf tersebut.

IV. Kesimpulan

Luka masa lalu akan terus menjadi luka apabila narai yang diublikasikan terus dibelokan dari kebenaran. Narasi masa lalu menjadi dasar pembentukan ide dan perspektif yang keliru untuk tatanan kehidupan suatu masyarakat sosial yang pincang dan lumpuh akan kebenaran. Peristiwa PKI dan kasus 1965 menjadi luka bagi sejarah Bangsa Indonesia. Pembantaian besar-besaran terhadap masyarakat sipil menjadi sejarah tumpah darah orang-orang tidak bersalah. Semua kebenaran ditutup oleh kepentingan yang menurut Habermas, uang dan kepetingan politik ihak tertentu. Segala cara digalakan untuk mencapai tujuan politik dengan mengorbankan rakyat. Dan kini narasi masa lalu sejarah Indonesia masih terus membekas. Rekonsiliasi dan kebenaran harus terus disuarakan, sehingga sejarah Bangsa Indonesia mendapatkan pengampunan dan memperoleh kebenaran yang masih terus membekas dapat disembuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Arendt, Hanna. *The Human Condition*. Chicago: The University of Chicago Press, 1958.

Anonim. "Menjaring Angin: Kronik Percaturan Politik di Maumere, NTT, Jelang, Selama Dan Pasca Pembantaian 20 Februari – 29 April 1966." Ende 1974.

Baghi, Felix. "Manuskrip Mata Kuliah Filsafat Pengakuan." Maumere: STFK Ledalero, 2021.

Baghi, Felix. *ALTERITAS*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2012.

Madung, Otto Gusti. Dalam tulisannya yang berjudul, "Rekonsiliasi, Politik Amnesti Dan Prinsip Persatuan." dari buku Johan Baptist Metz, *Memoria Passionis. Ein provozierendes Gedactnis in pluralistischer Gesellschaft*. Freiburg im Breisgau: Herder Verlag, 2006.

..... . *Negara, Agama Dan Hak Asasi Manusia*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2014.

MADUNG, Otto Gusti Ndegong. *Filsafat Politik: Negara dalam Bentangan Diskursus Filosofis*. 2013.

MADUNG, Otto Gusti Ndegong. "Rekonsiliasi, Politik Amnesti dan Prinsip Persatuan." (2015): 1-10.

Barut, Martin C., Pius Kanelmut, and Krispianus W. Sarhe. "Merajut Kembali Relasionallitas Masyarakat dan Pemerintah: Relevansi Politik Berasaskan Rekonsiliasi dan Kebenaran." *FOCUS 2.1* (2021): 38-45.